

PENDEKATAN MSN DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 72 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL

Sri Wahyuningsih

Program Studi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Kadiri, Kediri - Indonesia

Email Korespondensi : wahyuningsih0381@gmail.com

Diterima Redaksi: 05-09-2024 | Selesai Revisi: 26-09-2024 | Diterbitkan Online: 28-09-2024

Abstrak

Berkembangnya teknologi informasi menuntut semua negara mengikuti pergerakan globalisasi yang syarat dengan kecepatan dan keterbukaan. Dengan adanya hal tersebut pemerintah Indonesia bersama sumberdaya yang dimiliki telah berupaya membuat suatu kebijakan yang menunjang tercapainya identitas kependudukan digital. Salah satu kebijakan tersebut yaitu dengan dikeluarkannya PERMENDAGRI no. 72 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital atau disingkat (IKD). Penelitian ini akan menyajikan potret implementasi Permendagri Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital di Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk. Alasan ditentukannya Kelurahan Warujayeng dikarenakan penerapan Identitas Kependudukan Digital belum optimal semenjak dikeluarkannya kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan *mentality*, *system*, dan *networking* (MSN) untuk memotret penyelenggaraan kebijakan pencatatan kependudukan secara digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan Identitas Kependudukan di Kelurahan Warujayeng pada umumnya berlangsung dengan baik, dukungan kepala kelurahan serta para jajarannya dalam pelaksanaan program telah membantu dalam mendapatkan Identitas Kependudukan Digital, namun ada beberapa temuan kendala terkait penyelenggaraan di kelurahan ini. Ada hal yang muncul ke permukaan dan menonjol yaitu pemerintah setempat tidak memberikan waktu tambahan tertentu dan perlakuan khusus dalam pelayanan program ini seperti misalnya pelayanan jemput bola ke rumah warga dan juga sikap dan kesadaran masyarakat yang kurang akan pentingnya pemahaman program kependudukan digital.

Kata Kunci: *MSN Approach*; Implementasi Kebijakan Publik; Identitas Kependudukan Digital

Abstract

The development of information technology requires all countries to follow the movement of globalization which is full of speed and openness. With this, the Indonesian government together with its resources has attempted to create a policy that supports the achievement of digital population identity. One of these policies is the issuance of PERMENDAGRI no. 72 of 2022 concerning the Implementation of Digital Population Identity or abbreviated (IKD). This study will present a portrait of the implementation of the Permendagri on the Implementation of Digital Population Identity in Warujayeng Village, Tanjunganom District, Nganjuk Regency. The reason for determining

Warujayeng Village is because the implementation of Digital Population Identity has not been optimal since the policy was issued. This study uses a mentality, system, and networking (MSN) approach to capture the implementation of digital population registration policies. The results of the study showed that the implementation of Population Identity in Warujayeng Village generally went well, the support of the village head and his staff in implementing the program has helped in obtaining Digital Population Identity, but there were several findings of obstacles related to the implementation in this village. There were things that emerged and stood out, namely the local government did not provide certain additional time and special treatment in the service of this program such as home-based services to residents and also the attitude and awareness of the community that was lacking in the importance of understanding the digital population program.

Keywords: *MSN Approach; Public Policy Implementation; Digital Population Identity*

PENDAHULUAN

Implementasi kebijakan publik sebagai salah satu dimensi dalam proses kebijakan publik, yang juga sangat menentukan apakah sebuah kebijakan itu bersentuhan dengan kepentingan serta dapat diterima oleh publik (John, 2013). Dalam hal ini, dapat ditekankan bahwa bisa saja dalam tahapan perencanaan atau perumusan formulasi kebijakan dilakukan dengan sebaik-baiknya, tetapi jika pada tahapan implementasinya tidak memperhatikan *Standard Operating Procedures* (SOPs), maka apa yang diharapkan dari sebuah produk kebijakan itu (Karya, 2022). Pada akhirnya pun dipastikan pada tahapan evaluasi kebijakan, akan menghasilkan penilaian bahwa antara formulasi dan implementasi kebijakan tidak seiring sejalan bahwa implementasi dari kebijakan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan bahkan menjadikan produk kebijakan itu menjadi batu sandungan bagi pembuat kebijakan itu sendiri.

Salah satu metode untuk mengkaji kesuksesan implementasi kebijakan publik adalah *MSN Approach*. Pemikiran pengembangan teoritik tersebut berangkat dari sebuah realitas bahwa sebuah produk kebijakan yang akan diimplementasikan, dipastikan bermuara atau bersinggungan langsung dengan tiga dimensi *Policy of Stakeholders*, yaitu : *Government, Private Sector, dan Civil Society* (Carayannis & Campbell, 2010). Pemerintah (*Government*) dalam eksistensinya baik sebagai pihak pembuat dan pengambil kebijakan (aktor kebijakan), juga pemerintah sebagai aparatur pelaksana atau implementor kebijakan. Sektor Swasta (*Private sector*) sebagai pihak yang berkepentingan dengan produk kebijakan yang menjaga stabilitas kehidupan ekonomi dan kemasyarakatan melalui penciptaan dan penyediaan lapangan kerja bagi tenaga kerja usia produktif dan memiliki skills tertentu, maka seharusnya

mereka berada pada garda terdepan untuk ikut mendukung implementasi kebijakan yang berpihak kepada kepentingan publik. Sementara masyarakat sipil (*Civil society*: Perguruan Tinggi, Pers, NGO) sebagai pihak yang mestinya menyadari bahwa masyarakat sipil tidak lagi sekedar objek dari sebuah kebijakan, tapi sekaligus juga sebagai subjek dari kebijakan (Lindberg et al., 2014).

Dalam hal ini pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan kebijakan pembangunan, dimulai sejak perencanaan, dan pelaksanaan, pengawasan, serta yang tidak kalah pentingnya adalah keterlibatan masyarakat dalam mengamankan hasil-hasil pembangunan yang benar-benar bersentuhan dengan kepentingan publik, bahwa sebuah kebijakan publik akan menjadi aktual dan terarah dalam implementasinya, jika menggunakan atau memperhatikan paling tidak apa yang disebut dengan Model *MSN-Approach* (*Mentality-Approach, Systems-Approach, dan Networking-Approach*) atau Pendekatan Mental, Sistem, dan Jejaring Kerjasama antara Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat (Abror & Tyasotyningrum, 2022).

Sementara itu, pelayanan kependudukan digital di Indonesia ini bukanlah hal baru. Pelayanan pencatatan secara digital diberbagai daerah di Indonesia berada pada urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sangat vital dalam pelayanan kependudukan bagi masyarakat. Menurut penelitian dari (DAMAYANTI, n.d.) Efektivitas pelayanan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tinjauan pencapaian tujuan meningkat dari tahun sebelumnya. Pada tinjauan integrasi dan adaptasi, sudah dilaksanakan dengan baik. Namun, masih terdapat kendala antrean dan layanan *online*. Sehingga, perlu ditingkatkan sarana dan prasarana teknologi informasinya.

Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan inovasi Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri untuk digitalisasi dokumen kependudukan yang dapat digunakan oleh masyarakat di Indonesia yang sudah memiliki KTP elektronik. Pada IKD ini, penduduk yang sudah melakukan aktivasi akan memperoleh informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan dokumen kependudukan dan data pribadi penduduk. Layanan IKD (Identitas Kependudukan Digital) ini terintegrasikan dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) terpusat yang tetap dapat memberikan kepuasan serta kebebasan

otoritatif secara terbuka dan memberikan keamanan kepada pengguna IKD (Identitas Kependudukan Digital) (Bella & Widodo, 2024).

Pada IKD ini, penduduk yang sudah melakukan aktivasi akan memperoleh informasi elektronik digunakan untuk merepresentasikan dokumen kependudukan dan data pribadi penduduk. Tujuan adanya IKD (Identitas Kependudukan Digital) yaitu untuk mengikuti penggunaan teknologi informasi serta komunikasi terkait digitalisasi, meningkatkan penggunaan digitalisasi, mempercepat pertukaran pelayanan publik ataupun privat dalam bentuk digital dan memberikan keamanan kepemilikan IKD (Identitas Kependudukan Digital) (Widiyarta & Humaidah, 2023).

Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang akhirnya merubah regulasi yang berlaku, mengharuskan setiap warga negara menggunakan elektronik sebagai media pencatatan identitas kependudukan. Namun, masyarakat Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom lebih sering melakukan permohonan secara konvensional melalui bantuan pegawai kelurahan maupun kecamatan, sehingga beberapa tentunya menganggap rumit untuk melakukan aktivasi penggunaan IKD ini dan memilih untuk menulis surat pernyataan saja agar bisa segera mengajukan permohonan cetak ulang e-KTP. Berikut dibawah adalah kondisi perolehan desa atau kelurahan atas jumlah warga yang telah memiliki Identitas Kependudukan Digital atau IKD.

Tabel 1. Perolehan IKD Kecamatan Tanjung Anom

DESA	Jumlah Wajib KTP	Jumlah Target IKD	Perolehan IKD	
			Januari 2024	Persentase
KAMPUNG BARU	8.427	2.107	215	10,21%
JOGOMERTO	4.138	1.080	295	27.33%
KEDUNGREJO	7.630	1.908	154	8.07%
SAMBIREJO	4.172	1.043	92	8.82%
DEMANGAN	4.775	1.194	539	45,15%
TAANJUNGANOM	4.175	1.179	334	28,34%
WARUJAYENG	14.837	3.709	271	7,31%
KEDUNGOMBO	5.523	1.381	128	9.27%
SUMBERKEPUH	9.292	2.323	238	10,25%

WATES	2.045	511	205	40,10%
MALANGSARI	1.187	468	327	69,87%
GETAS	4.453	1.113	439	39,43%
SONOBEKEL	3.974	994	225	22,65%
NGADIREJO	4.060	1.015	132	13,00%
BANJARANYAR	5.714	1.429	343	24,01%
SIDOHARJO	7.618	1.905	859	45,10%

Sumber: Data Kependudukan Kecamatan Tanjunganom

Table tersebut dapat disimpulkan bahwa Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk tergolong paling sedikit jumlah perolehan Identitas Kependudukan Digital di antara Desa dan Kelurahan lain yang ada di Kecamatan Tanjunganom. Secara geografis wilayah Kelurahan Warujayeng berdekatan dengan kota kecamatan, infratuktur dan akses kendaraan di desa ini sangat mudah terjangkau bahkan didesa ini letak wilayahnya sangat strategis dan memiliki prasarana yang mendukung dalam banyak hal baik ekonomi, social dan lain-lain. Oleh karenanya hal inilah yang menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih mendalam apakah ada permasalahan atau *gap* di kelurahan tersebut, memunculkan judul penelietian yaitu pendekatan *MSN approach* dalam implementasi kebijakan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital di Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.

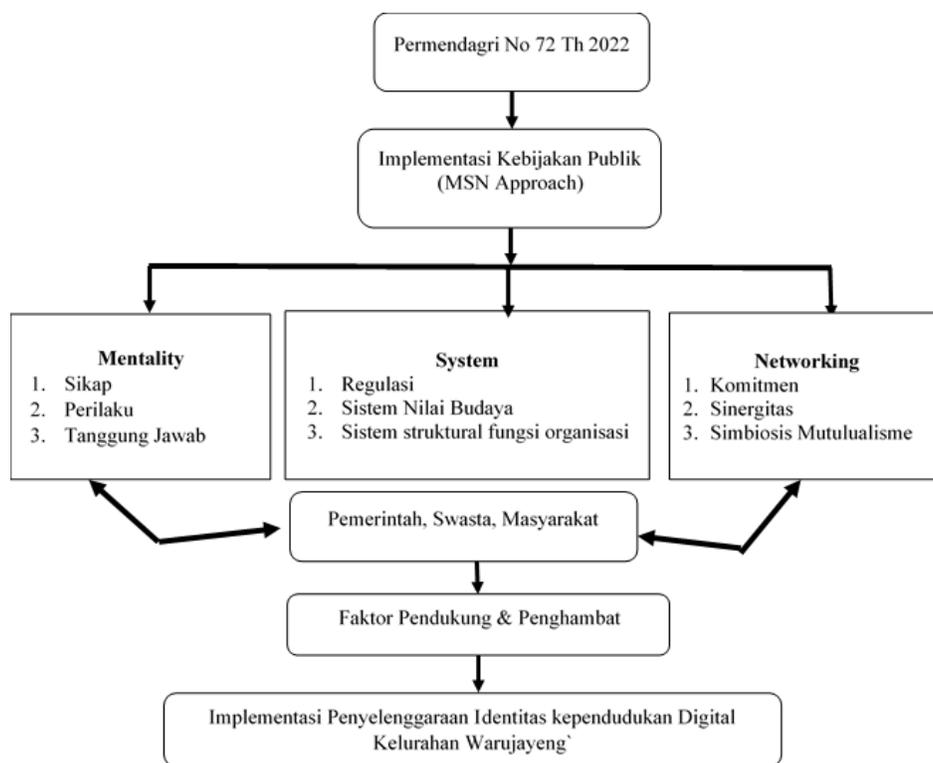
METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan objek penelitian secara jelas dan lebih mendetail (*komprehensif*), serta untuk menarik generalisasi yang menjelaskan variabel yang menyebabkan suatu gejala atau kenyataan sosial (Moleong Lexy, 2000). Lokasi Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Waujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Ngajuk, dalam hal ini memilih lokasi tersebut dengan pertimbangan bahwa dari semua desa dan kelurahan yang ada di Kecamatan Tanjunganom, Kelurahan Warujayeng terbilang Kelurahan yang paling rendah dalam memperoleh Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Sementara itu, penelitian ini memiliki batasan penelitian. Pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi dan reabilitas masalah yang akan dipecahkan (Sugiyono, 2016). Adapun penelitian ini difokuskan pada konsep *MSN Approach* yang

dikembangkan oleh (Abror & Tyasotyningrum, 2022) a) pendekatan mental yang mencakup sikap dan respon pemerintah dan masyarakat dengan adanya penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital, b) Pendekatan system yang mencakup regulasi serta struktural di Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk dengan adanya penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan c) Pendekatan jejaring mengenai simbiosis mutualisme terdengannya adanya penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital.

Sumber data primer dalam penelitian diambil dari proses wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Sementara Teknik analisis data yang digunakan menggunakan analisis data kualitatif. Menurut (Wahidmurni, 2017) analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis kualitatif fokusnya pada penunjukkan makna, deskripsi, penjernihan, dan penempatan data pada konteksnya masing-masing, dan seringkali melukiskannya di dalam kata-kata daripada di dalam angka-angka. Adapun berikut penulis lampirkan kerangka konsep penelitian.



Gambar 1. Kerangka Konsep Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan teori Impelentasi yang digunakan peneliti pada artikel ini bahwa Pemikiran pengembangan teoritik tersebut berangkat dari sebuah realitas sebuah produk kebijakan yang akan diimplementasikan, dipastikan bermuara atau bersinggungan langsung dengan tiga dimensi *Policy of Stakeholders*, yaitu: *Government*, *Private Sector*, dan *Civil Society* dengan menggunakan pendekatan *Mentality*, *System* dan *Networking* (MSN) (Abror & Tyasotyaningrum, 2022).

a) Aspek *Mentality*

Aspek *Mentality* dapat dilihat dari sikap, perilaku dan tanggung jawab pelaksana. Sikap pemerintah kelurahan warujayeng adalah melaksanakan tupoksi masing-masing unit kerja sesuai dengan jobdesknya. Privat sektor (pihak swasta). Di tataran kelurahan tidak ditemukan partisipasi maupun kontribusi pihak swasta, mengingat program ini adalah murni dari inisiasi permendagri untuk memaksimalkan SDM yang ada. Warga masyarakat kelurahan Warujayeng menberikap sikap yang beragam. Di sisi lain antusiasme dan animo masyarakt terkait dengan IKD sangat tinggi, petugas kelurahan sampai kewalahan dalam melayani namun disisi lain beberapa warga acuh dan tidak peduli adanya program IKD di kelurahan tersebut.

Sementara itu, perilaku pada masing-masing aktor yang terdampak dari Implementasi Identitas Kepedndudukan Digital Nganjuk masih dalam rel dan batas serta patuh pada aturan dan nilai yang ada artinya dari sisi Pemerintah membuat produk kebijkan berdasarkan kebutuhan dan keinginan masyarakat yang terus mengikuti perkembangan Teknolgi Informasi yang serba digital.masyarakat tetap melaksanakan produk kebijakan pemerintah yang dirasa memberikan manfaat. Peran swasta dalam hal ini menjadi investor.

Semua aktor yang terlibat dalammasing masing mempunyai rasa tanggung jawab terhadap peranya, pemerintah melaksanakan tugas sesuai jobdesak serta tupoksinya serta berkomitmen atas kebijakan yang ada, swasta sebagai altor yang memberikan dukungan datas kebutuhan prasarana yang tidak dapat disediakan oleh pemerintah, serta masyarakat yaitu dengan peran sertanya yang aktif melaksanakan kegiatan terkait dengan kebijakan yang adqa.

Terdapat beberapa hal yang menjadi pendukung kesuksesan kebijakan ini. Diantaranya adalah kebijakan ini menjadi spirit para penyelenggara pemerintahan kelurahan Warujayeng sehingga mereka lebih mudah dan ringan dalam mengemban tugas dan kewajibannya, selain itu juga dukungan dari pucuk pimpinan, dalam hal ini dukungan Lurah Warujayeng, yang dengan memberikan insentif tersendiri berupa tambahan rupiah atas loyalitas dan dedikasi penyelenggara pemerintah yang mendedikasikan waktu tenaga dan pikirannya diluar ketentuan jam normal. Sementara itu bagi *private sector* menjadi daya tarik pihak swasta yaitu mereka mendapatkan proyek atau tender sehingga mendapatkan keuntungan finansial atas proyek yang dikerjakan.

Sedangkan faktor atau determinan yang menghambat adalah Beberapa orang yang menjadi warga kelurahan Warujayeng tidak memiliki HP canggih dan bahkan ada yang tidak paham internet, sehingga mempersulit mereka untuk menggunakan IKD. Banyak dari masyarakat kelurahan Warujayeng tidak tahu mengenai Implementasi Permendagri No. 72 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. Selain itu, pemerintah juga memiliki hambatan yaitu kurangnya sumberdaya manusia dan sarana prasarana yang menunjang kelancaran program dalam hal ini jaringan internet sinyal nya naik-turun menyebabkan saat online membutuhkan waktu cukup lama.

b) Aspek Sistem

Pendekatan sistem dipandang merupakan salah satu pendekatan logis dan analitis terhadap berbagai bidang, termasuk bidang implementasi kebijakan publik. Suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari sejumlah komponen yang saling berhubungan dan berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Berkenaan dengan itulah, maka dapat ditegaskan bahwa setiap kebijakan yang akan diimplementasikan, pasti tidak luput dari pengaruh langsung dan tidak langsung dari sebuah sistem yang melingkupi dari kebijakan itu sendiri. respon, sinergitas antar aktor yang terlibat dalam suatu produk kebijakan yang di implementasikan, pendekatan dipandang dari beberapa sisi diantaranya:

1) Pemerintah

Interaksi dan hubungan Lembaga pemerintah dengan pihak diluar non pemerintah di Kelurahan Warujayen berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Pemerintah menyediakan prasarana sesuai dengan kemampuannya , berkolaborasi dengan

pihak swasta demi kelancaran tujuan program yang nantinya mempermudah Masyarakat sebagai penerima manfaat kebijakan.

2) *Private Sector*

Keterlibatan sektor swasta di kelurahan Warujayen terkait dengan implementasi penyelenggaraan IKD belum begitu banyak berperan, karena regulasi yang mendukung keterlibatan pemerintah dengan pihak ketiga terkait dengan penyelenggaraan IKD tidak ada di kelurahan Warujayeng.

3) *Masyarakat*

Saat ini informasi terkait dengan tata cara dan aktifasi IKD dapat diakses dan dilayani hanya ketika masyarakat berkunjung ke kantor Kelurahan Warujayeng.

Faktor yang mendukung dari sisi system adalah sebagai satu kesatuan yang terintegrasi dan tersutruktur oleh jobdesak pada masing-masing pihak akan mempermudah kordinasi sesuai tupoksi yang dintruksikan oleh pucuk pimpinan yang dalam hal ini lurah kelurahan Warujayeng mendukung penuh atas program IKD. Selain itu, adanya MoU dengan swasta juga menjadi pendukung kesuksesan kebijakan. Sementara itu yang menjadi penghambat adalah system ini belum familiar untuk masyarakat di Kabupaten Nganjuk pada umumnya.

c) *Aspek Networking*

Di era sekarang ini masih mengandalkan atau mengedepankan semangat sektoral, semangat kelompok, semangat individualistik dirasa kurang dapat menghasilkan output yang maksimal'. Yang tepat adalah bahwa apapun yang dibangun untuk kepentingan publik, seyogyanya mengedepankan semangat sinergitas dan jejaring kerjasama antar stakeholder kebijakan. Sinergitas pemerintah kelurahan warujayeng dengan pihak non pemerintah kurang begitu ada, seperti halnya di Kelurahan satu Kecamatan Tanjung anom, penyelenggaraan IKD tersebut dilaksanakan dengan system jemput bola yaitu dengan mendatangi door to door dari rumah kerumah warga untuk mensukseskan penyelenggaraan IKD. Faktor yang mendukung kesuksesan dari aspek jejaring ini adalah kebutuhan Identitas Kependudukan Digital masyarakat dapat terpenhi dengan optimal dan efisien. Sementara itu, hal yang menjadi penghambat adalah sektor swasta tidak dapat mengakses dan masuk untuk menyediakan keterbatasn pemerintah dalam hal jaringan internet dan prasarana yang

mendukung semisal menyediakan tambahan tower jaringan internet di Kelurahan Warujayeng. Selain itu, kurangnya respon pemerintah atas keterbatasan SDM dan prasarana yang menunjang kelancaran program IKD.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa implemptasi implementasi peraturan menteri dalam negeri no 72 tahun 2022 tentang penyeleanggaran Identitas Kependudukan di Kelurahan Waujayeng belum sepenuhnya berjalan dengan baik sesuai kerangka konsep penelitian berdasarkan Implementasi Kebijakan sebagaimana diungkapkan oleh (Abror & Tyasotyaningrum, 2022) yaitu pendekatan *Mentality, System, Networking* yang melibatkan Pemerintah, Privat sektor dan masyarakat. Pihak Kelurahan Warujayeng mendukung penyelenggaraan IKD dengan sumber daya yang dimiliki seoptimal mungkin, animo masyarakat untuk melakukan registrasi Identitas Kependudukan juga tinggi, namun banyak darii warga masyarakat Kelurahan Warujayeng yang belum mengetahui pentingnya dan keberadaan IKD, sehingga mereka tidak berupaya untuk melakukan registrasi IKD, hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi dari Kelurahan Warujayrng kepada warganya. Keterlibatan privat sektor yang bisa memberi dukungan suksesnya program IKD tidak dilibatkan oleh pihak pemerintah, sehingga prasarana yang menunjang kesuksesan program masih terbatas dan kurang memenuhi syarat.

REFERENSI

- Abror, D., & Tyasotyaningrum, B. (2022). MSN-APPROACH DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DI DESA LAMBANGKUNING KECAMATAN KERTOSONO KABUPATEN NGANJUK. *Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, 6(2), 248–258.
- Bella, V. S., & Widodo, D. (2024). Implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Dalam Menunjang Pelayanan Publik Masyarakat Di Kecamatan Tambaksari. *Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 14–31.
- Carayannis, E. G., & Campbell, D. F. J. (2010). Triple Helix, Quadruple Helix and Quintuple Helix and how do knowledge, innovation and the environment relate to each other?: a proposed framework for a trans-disciplinary analysis of sustainable development and social ecology. *International Journal of Social Ecology and Sustainable Development (IJSESD)*, 1(1), 41–69.
- DAMAYANTI, D. A. (n.d.). *EFEKTIVITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI MASA PERALIHAN LAYANAN TAHUN 2021 (STUDI PADA*

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANDUNG).

- John, P. (2013). *Analyzing public policy*. Routledge.
- Karya, B. (2022). *Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Sekolah Dasar*. Penerbit NEM.
- Lindberg, M., Lindgren, M., & Packendorff, J. (2014). Quadruple Helix as a way to bridge the gender gap in entrepreneurship: the case of an innovation system project in the Baltic Sea region. *Journal of the Knowledge Economy*, 5(1), 94–113.
- Moleong Lexy, J. (2000). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Remaja Posdakarya, Bandung.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*. PT. Alfabet.
- Wahidmurni, W. (2017). *Pemaparan metode penelitian kualitatif*.
- Widiyarta, A., & Humaidah, I. (2023). Implementasi Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (Ikd) Dalam Mendorong Digitalisasi Di Kelurahan Jepara Kota Surabaya. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(18), 43–51.